

Rancang Bangun Web Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Tajam Grobogan untuk Meningkatkan Layanan Masyarakat

Abdussalam¹, Ajib Susanto², Ibu Utomo Wahyu Mulyono³, De Rosal Ignatius Moses Setiadi⁴, Ibnu Gemaputra Ramadhan⁵

^{1,2,3,5,6} Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

E-mail: ¹grey.salam@dsn.dinus.ac.id, ²ajib.susanto@dsn.dinus.ac.id,

³ibnu.utomo.wm@dsn.dinus.ac.id, ⁴moses@dsn.dinus.ac.id, ⁵111201710305@mhs.dinus.ac.id

Abstrak

Masyarakat secara umum masih belum paham akan bantuan hukum jika mendapat masalah hukum, terutama bagi masyarakat desa atau masyarakat yang ekonomi masih tergolong rendah. Sosialisasi dan pemahaman tentang hukum perlu ditingkatkan dengan cara memberikan informasi untuk pengetahuan yang terkini melalui media daring. Berbagai informasi kegiatan untuk masyarakat LKBH belum tersampaikan langsung, baik perkembangan kegiatan organisasi, informasi bantuan hukum yang sedang dilakukan dan berbagai hal informasi terkait dengan layanan kepada masyarakat, kebutuhan informasi terkini dapat diwujudkan dengan membangun website yang diakses pengguna umum. Pengembangan web dan pendampingan mengacu konsep *Plan, Do, Check and Act (PDCA)* dengan urutan kegiatan perencanaan, pengerjaan, evaluasi dan tindak lanjut dari proses sebelumnya. Hasil pengabdian masyarakat yaitu terwujudnya web LKBH yang dapat memberikan informasi seputar Grobogan dan layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat dimanapun dan kapanpun.

Kata kunci: LKBH, Web, Konsultasi, Bantuan, Hukum.

Abstract

The community in general still does not understand legal aid if they get into legal problems, especially for rural communities or people whose economy is still relatively low. Socialization and understanding of the law need to be improved by providing information for up-to-date knowledge through online media. Various information on activities for the LKBH community has not been conveyed directly, both the development of organizational activities, information on legal aid that is being carried out and various information related to services to the community, the latest information needs can be realized by building a website that is accessed by general users. Web development and assistance refers to the concept of Plan, Do, Check and Act (PDCA) with a sequence of planning, execution, evaluation and follow-up activities from the previous process. The result of community service is the realization of the LKBH web that can provide information about Grobogan and consultancy services and legal assistance to the community wherever and whenever.

Keywords: LKBH, Web, Consulting, Assistance, Legal

1. PENDAHULUAN

Hak dalam memperoleh layanan bantuan perkara hukum bagi masyarakat yang tersangkut masalah hukum merupakan hak asasi. Mendapatkan bantuan hukum adalah wujud dari hak persamaan perlakuan di dalam hukum. Terdapat istilah yaitu *equality before the law* telah termuat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut adalah konsekuensi Negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945[1] sudah menegaskan hal tersebut.

Rancang Bangun Web Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Tajam Grobogan untuk Meningkatkan Layanan Masyarakat

Masyarakat saat ini masih belum paham akan bantuan hukum jika mendapat masalah hukum, terutama bagi masyarakat desa atau masyarakat yang ekonomi masih tergolong rendah. Bantuan hukum bagi orang miskin sendiri sudah diatur oleh negara dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011[2] jika tersangkut masalah hukum. Sayangnya belum banyak yang memanfaatkan ini akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Masih banyak peraturan perundangan di Indonesia yang belum diketahui masyarakat. Bahkan untuk undang-undang yang begitu familiar pun kadang belum tahu seperti UU Narkotika, UU ITE, UU Korupsi dan berbagai macam peraturan, masyarakat hanya sekedar tahu dan tidak memahami apa saja sebenarnya yang diatur di peraturan itu[3].

Website saat ini berkembang sangat pesat untuk media komunikasi dan pemberian informasi yang benar-benar efektif kepada masyarakat. Pengguna internet di Indonesia berdasarkan survei dari WeAresocial tahun 2020 yaitu 202.2 juta atau 73.3% dari jumlah penduduk, untuk pengguna *mobile connection* 345.5 juta[4][5] atau 125.6% dari jumlah penduduk hal ini sangat berpotensi sebagai wadah untuk mensosialisasikan berbagai macam peraturan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat umum, termasuk di dalamnya masalah bantuan hukum dan penyampaian berbagai macam informasi jika menghadapi masalah hukum.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Tajam Grobogan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah salah satu bagian dari LSM Aliansi Tajam yang memiliki media *online* yaitu mediatajam.com[6] yang bergerak di dalam bantuan kepada masyarakat, mengawal kegiatan pemerintahan yang bersih, pengawasan di Kepolisian dan lain sebagainya. LKBH Tajam baru berdiri yang masih membutuhkan berbagai macam kebutuhan akan sosialisasi dan media untuk dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Berbagai macam informasi yang dimiliki LKBH belum dipublikasikan dan belum terdokumentasi dengan baik karena belum adanya wadah media, baik perkembangan kegiatan organisasi, informasi bantuan hukum yang sedang dilakukan dan berbagai hal informasi terkait dengan layanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan media yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan mengelola dan mendokumentasikan berbagai kegiatan dan konsultasi layanan masyarakat agar berjalan dengan baik dengan membangun website LKBH Grobogan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan informasi yang selalu terkini.

2. METODOLOGI

Tahapan membangun dan implementasi web LKBH Tajam Grobogan menggunakan model *Plan, Do, Check and Act (PDCA)*[7][8][9][10] dengan tahapan seperti berikut ini :



Gambar 1 Konsep PDAC

Model PDCA merupakan proses untuk menyelesaikan dan mengendalikan permasalahan dilakukan berdasarkan tahapan yang urut dan tersistematis. Pelaksanaan PDCA dapat dijelaskan berikut ini :

1. P (*Plan* = Perencanaan)

Di tahapan ini menentukan tujuan dan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menentukan suatu hasil untuk dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menentukan kebutuhan pengguna, perancangan web, pengenalan/sosialisasi dan menetapkan tahap yang nanti dilakukan.

2. D (*Do* = Kerjakan)

Di tahapan ini perencanaan sebelumnya sudah ditetapkan diproses, termasuk mematuhi batasan dan ukuran kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam perencanaan. Di tahap ini harus dihindari menunda pekerjaan yang sudah dirumuskan, mulai dari pengumpulan berita, dokumentasi kegiatan, kegiatan LKBH dan kelengkapan kebutuhan lainnya. Selanjutnya dibangun web LKHB, dilakukan pengujian dan dilaksanakan pelatihan pengoperasiannya untuk mulai mengisi data berita, gallery, kegiatan, menjawab konsultasi dan bagikan ke sosial media.

3. C (*Check* = Evaluasi)

Melakukan evaluasi dari tujuan dan prosesnya serta menyusun laporan-laporan yang sudah dihasilkan. Pengecekan dilakukan terhadap hal yang sudah dikerjakan, sudahkah memenuhi standar yang dirumuskan atau masih terdapat kekeliruan. Di tahap ini melihat perkembangan pengguna web LKBH dan laporan konsultasi yang masuk serta Menyusun kembali hal yang dapat digunakan agar kualitas layanan web LKBH dapat meningkat.

4. A (*Act* = Menindaklanjuti)

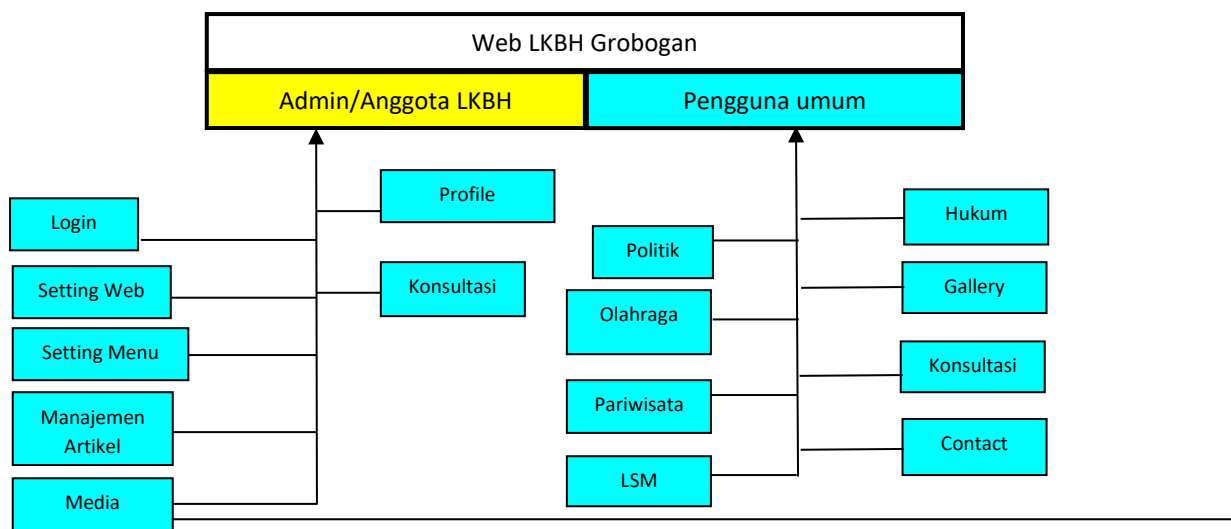
Di tahap ini melakukan evaluasi menyeluruh dari hasil tujuan yang dirumuskan dan prosesnya serta melakukan perbaikan sesuai kebutuhn, dan jika masih terdapat kekurangan segera melakukan kegiatan dalam rangka perbaikan web.

3. PEMBAHASAN

Pembangunan dan pendampingan web LKBH Grobogan berdasarkan model PDCA dapat dirinci pada pembahasan berikut.

3.1. Perencanaan

Pada tahap ini mensosialisaikan kegiatan pada mitra yaitu LKBH Grobogan, merumuskan tujuan dan pengambilan data serta mempelajari portal web sejenis sebagai bahan pertimbangan perancangan dan implementasi.



Rancang Bangun Web Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Tajam Grobogan untuk Meningkatkan Layanan Masyarakat

Gambar 2 Desain Arsitektur Web LKBH Grobogan

Gambar 3 merupakan desain arsitektur web LKBH Grobogan yang diperlukan pada saat pembangunan web secara utuh, untuk pengguna administrator dan pengguna umum.

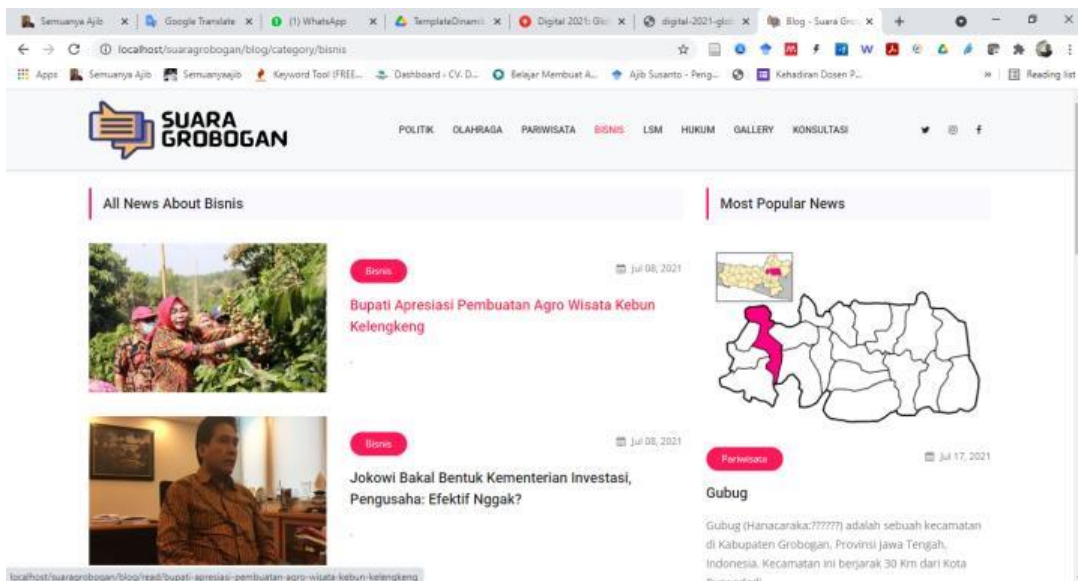
3.2. Kerjakan

Di tahap ini mengerjakan pembuatan web LKBH Grobogan, setelah selesai diunggah di domain dan hosting yang sudah disediakan, Gambar 4 berikut ini halaman utama dari web.



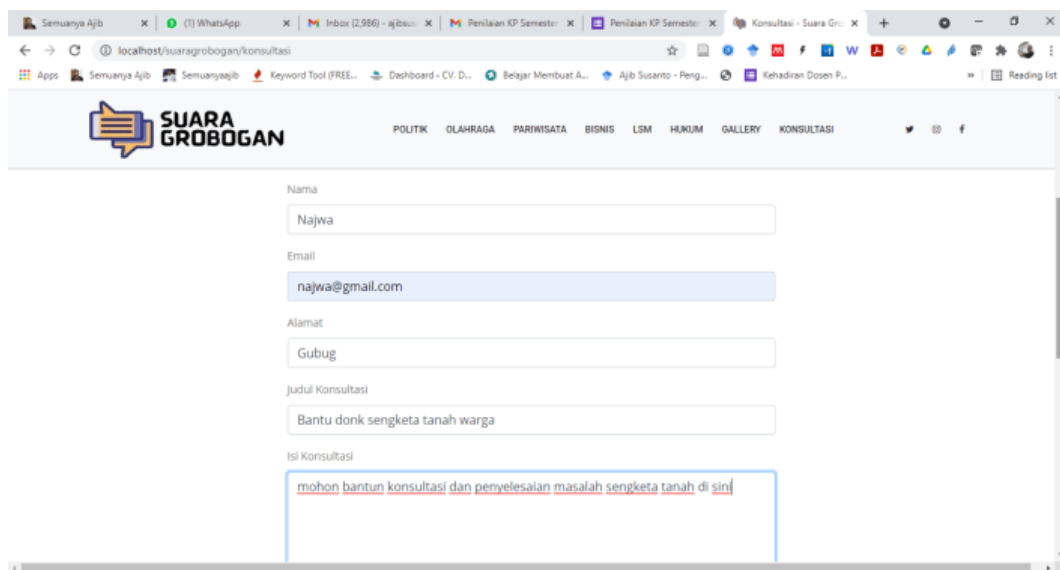
Gambar 4 Halaman utama Web Suaragrobogan.com

Gambar 4 di atas menunjukkan halaman utama web suaragrobogan.com yang dengan fitur yang sudah disediakan yaitu berita politik, olahraga, pariwisata, bisnis, LSM, hukum, gallery, dan konsultasi.



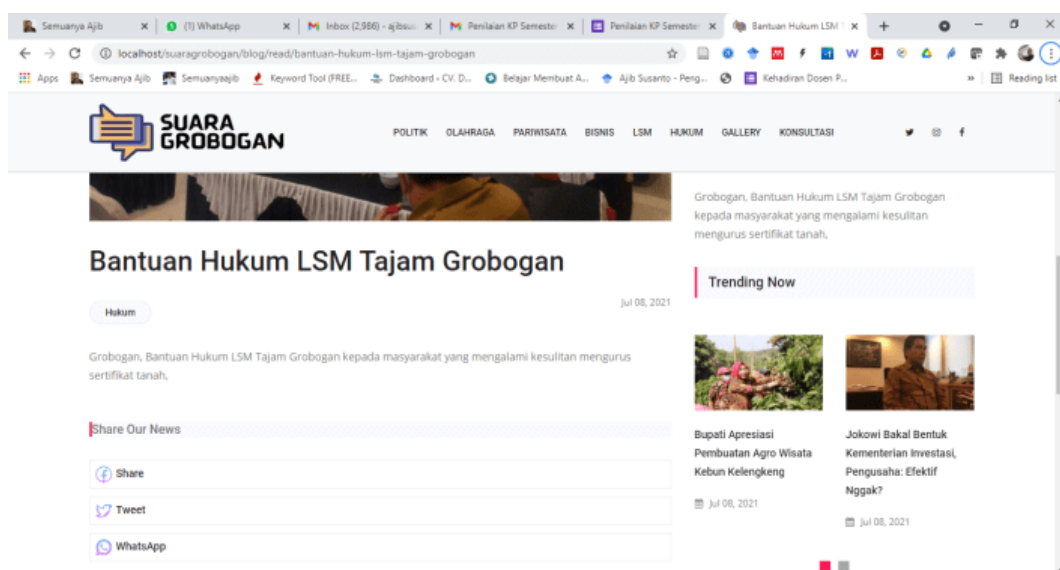
Gambar 5 Halaman Kategori Berita Bisnis

Gambar 5 menampilkan halaman artikel kategori bisnis yang dapat dilihat oleh semua pengguna yang berminat dengan berita bisnis di seputar Grobogan.



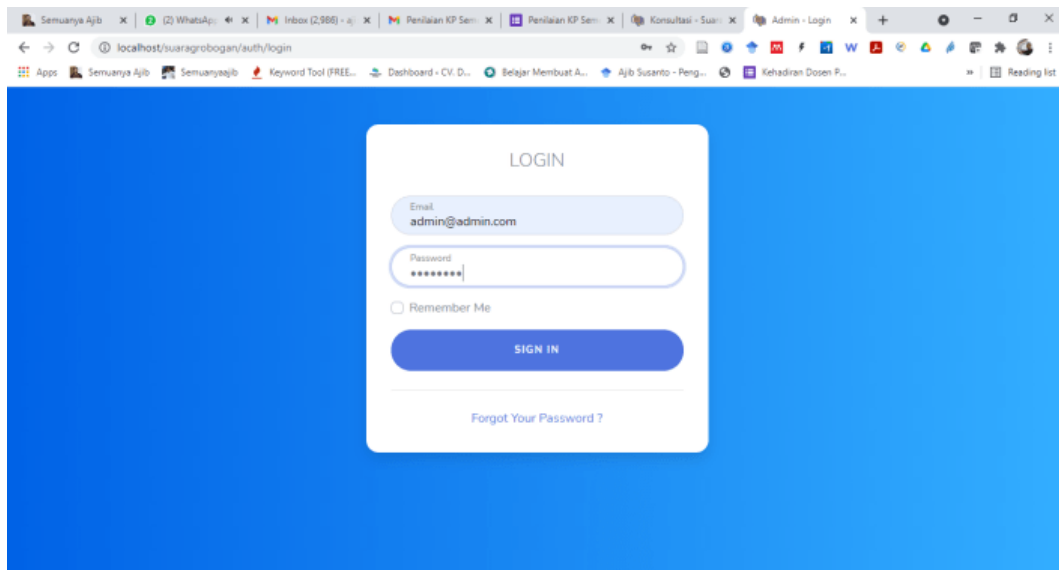
Gambar 6 Halaman Konsultasi

Gambar 6 di atas halaman konsultasi untuk pengguna umum yang ingin berkonsultasi permasalahan yang dihadapi.



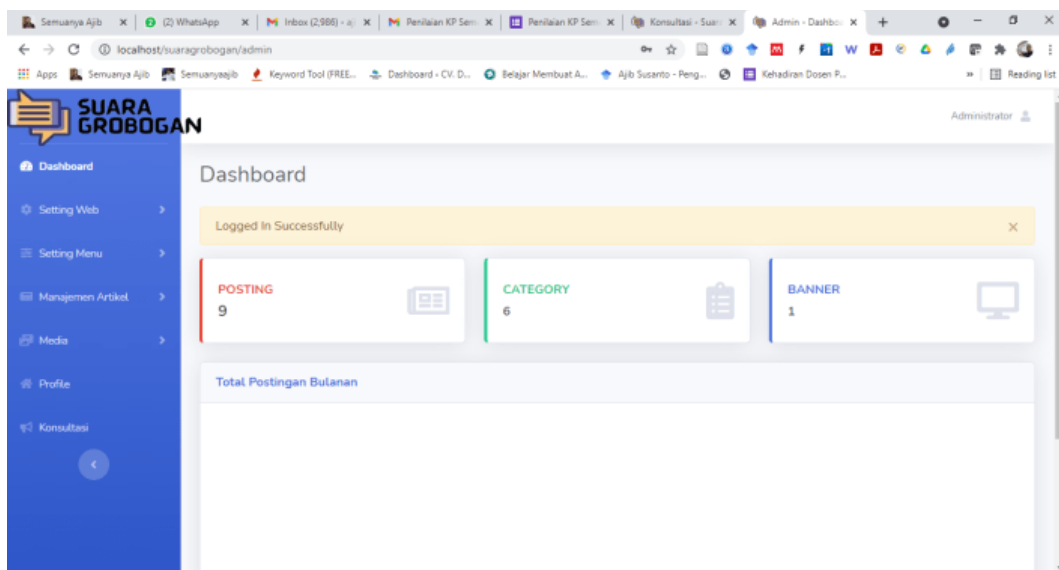
Gambar 7 Halaman Detail Berita

Gambar 7 adalah halaman detail berita yang disajikan oleh LKBH Grobogan yang dapat dibagikan ke berbagai *platform* media sosial seperti ke *Facebook*, *Twitter* dan *Whatsapp*.



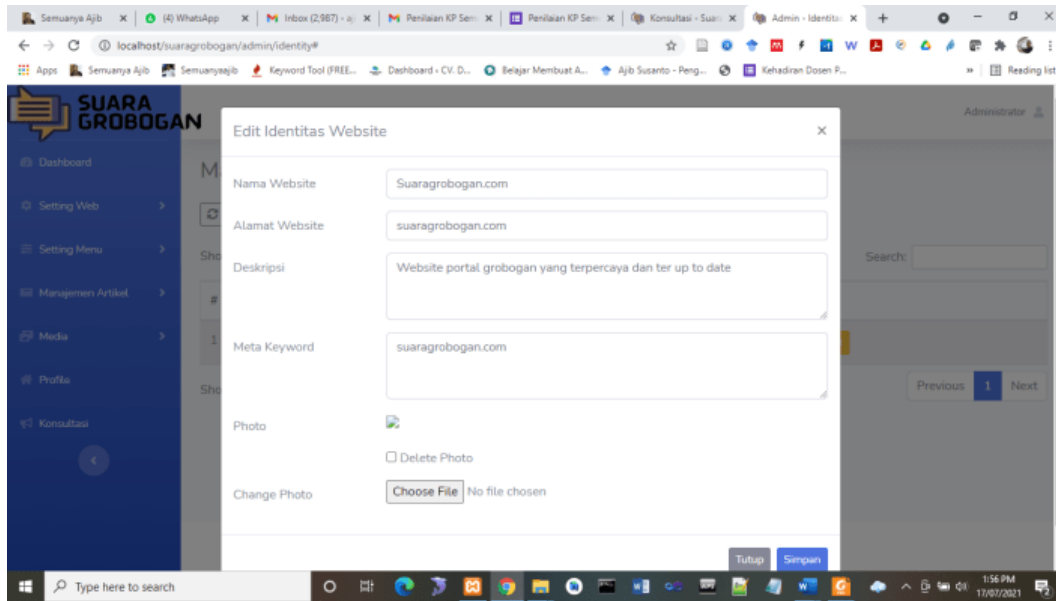
Gambar 8 Halaman Admin Login

Gambar 8 halaman untuk admin masuk dalam mengelola web secara keseluruhan, sebelum melakukan *login* terlebih dahulu harus terdaftar sebagai admin, jika tidak maka akses masuk tidak dapat dilakukan.



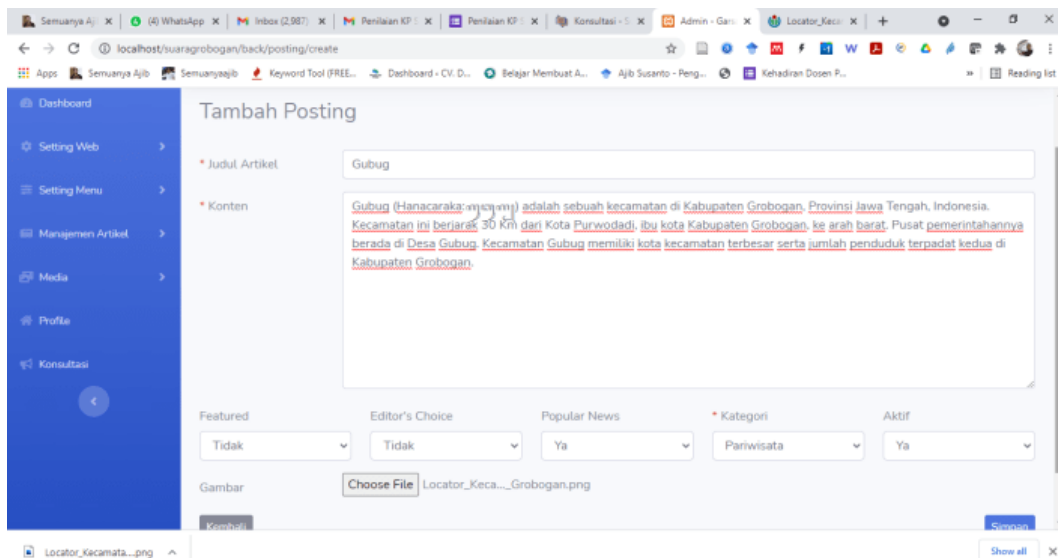
Gambar 9 Halaman *Dashboard* Web

Gambar 9 menjelaskan halaman *dashboard* administrasi LKBH, pengguna admin yang terdaftar akan mendapatkan *dashboard* utama admin untuk melakukan berbagai pengaturan dan publikasi berita serta menjawab konsultasi dari pengunjung web.



Gambar 10 Halaman Update Identitas Web

Dari Gambar 10 dapat dilihat salah satu fitur admin web untuk dapat melakukan perubahan identitas web yang sesuai dengan jenis web dan promosi web.



Gambar 11 Halaman Tambah Berita

Gambar 11 halaman untuk menambah berita sesuai dengan kategori yang sudah disediakan dengan mengisi judul, konten, kategori, gambar dan status berita.

Setelah selesai implementasi web LKBH tahap selanjutnya membuat video tutorial, tutorial panduan dan mendampingi serta memberikan pelatihan penggunaan web LKBH Grobogan kepada anggota LKBH sebagai admin dan mencoba sebagai pengguna umum.

3.3. Evaluasi

Tahapan ini yang dilakukan adalah *monitoring* dan evaluasi web LKBH serta merumuskan

hal apa saja yang dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui web. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Mengamati umpan balik dari masyarakat setelah web dipublikasikan dan digunakan.
- b. Memantau informasi terbaru yang dipublikasikan ke masyarakat berhubungan dengan kegiatan LKBH dan konsultasi masyarakat.
- c. Menganalisa dan merumuskan tanggapan dari masyarakat dalam penggunaan web untuk konsultasi dan informasi yang dipublikasikan apakah cenderung positif atau negatif agar dapat menentukan perbaikan dan langkah selanjutnya dalam membantu masyarakat.

4. KESIMPULAN

Terwujudnya web LKHB Grobogan memudahkan bagi anggota sebagai admin dalam memberikan informasi dan konsultasi hukum secara *online* kepada masyarakat, memudahkan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan penyelesaian suatu masalah hukum. Bagi masyarakat umum memudahkan memperoleh informasi kegiatan bantuan hukum dan informasi lainnya yang dilayani oleh LKHB Grobogan, akses untuk konsultasi dan pengaduan dapat langsung melalui web LKBH yang lebih cepat dan menghemat biaya sebab kapanpun dan dimanapun diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Baital, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah," *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 3, no. 2, pp. 137–152, 2016.
- [2] YLBHI, "Bantuan Hukum Orang Miskin Gratis," 2014. [Online]. Available: <https://ylbhi.or.id/informasi/berita/bantuan-hukum-orang-miskin-gratis/>. [Accessed: 12-Nov-2020].
- [3] N. Iguana, "Semua Masyarakat Dianggap tahu Hukum, Kok Bisa?," *klikhukum.id*, 2020. [Online]. Available: <https://klikhukum.id/semua-masyarakat-dianggap-tahu-hukum-kok-bisa/>.
- [4] S. Kemp, "Digital 2021: Overview report," *Glob. Digit. Reports*, p. 299, 2021.
- [5] A. Susanto, *IT untuk Pembangunan Desa*. 2021.
- [6] Mediatajam.com, "Media Tajam," 2021. [Online]. Available: <http://mediatajam.com>. [Accessed: 29-Jul-2021].
- [7] H. Poerwanto G, "Plan-Do-Check-Act (PDCA)," <https://sites.google.com>. [Online]. Available: <https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA>. [Accessed: 11-Oct-2019].
- [8] A. Susanto, C. A. Sari, D. R. I. Moses, E. H. Rachmawanto, and I. Utomo, "Implementasi Facebook Marketplace untuk Produk UMKM sebagai Upaya Peningkatan Pemasaran dan Penjualan Online," *J. Pengabd. Masy. - LPPM Univ. Dian Nuswantoro Semarang*, vol. 3, no. 1, pp. 42–51, 2020.
- [9] I. U. Wahyu Mulyono, A. Susanto, E. H. Rachmawanto, C. A. Sari, and D. R. I. M. Setiadi, "Implementasi E-Learning Menggunakan Edmodo bagi Guru-Guru SD Kecamatan Cawas, Klaten," vol. 3, no. 1, pp. 56–64, 2020.
- [10] A. Susanto *et al.*, "Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk Peningkatan Layanan dan Keterbukaan Informasi di Desa," vol. 4, no. 2, pp. 38–47, 2021.